

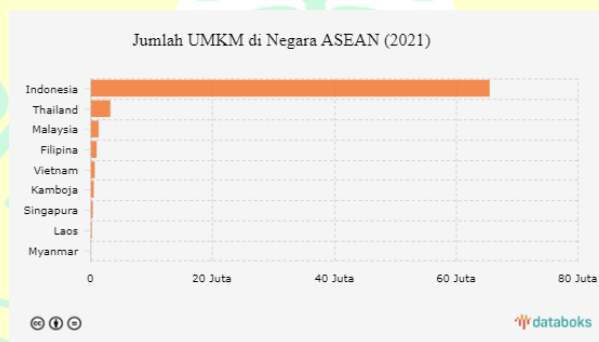
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi solusi positif untuk negara Indonesia agar dapat keluar dari berbagai masalah sosial dan ekonomi. UMKM memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk perkembangan ekonomi negara Indonesia. Pemerintah perlu memperhatikan upaya pengembangan dan menjaga keberadaan UMKM agar tetap terus berlanjut.

Menurut Martauli (2019), menyebut peningkatan perekonomian yang terjadi di Indonesia merupakan wujud peran adanya UMKM. Berdasarkan gambar dibawah ini, dapat dilihat dengan jelas bahwa jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 menempati urutan pertama terbanyak dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Jumlah UMKM di Indonesia pada data yang didapat oleh *ASEAN Investment Report* mencapai sekitar 65,46 juta pelaku usaha. Sementara itu, negara-negara lain di ASEAN memiliki UMKM yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia.



Gambar 1. 1 Jumlah UMKM di Negara ASEAN Tahun 2021

Sumber : Katadata (2022)

Daya serap tenaga kerja pada UMKM di Indonesia memiliki angka yang cukup tinggi yaitu sebesar 97%. Tidak hanya itu, UMKM telah menyumbangkan

kontribusi yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yakni menyumbangkan angka 60,3%, serta sebesar 14,4% memiliki andil terhadap ekspor nasional. Angka daya serap tenaga kerja pada UMKM di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN masih paling besar, karena pada negara lain UMKM hanya memiliki daya serap tenaga kerja di angka 35% sampai 85%. Hal ini menjadi bukti bahwa kondisi perekonomian negara Indonesia sebagian besar ditopang oleh UMKM-UMKM yang ada (Ahdiat, 2022).

Saat ini jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya, salah satunya pada kota Jakarta Timur. Menurut data dari Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Sudin PPKUKM) Jakarta Timur jumlah UMKM di wilayah Jakarta Timur mengalami kenaikan 12 ribu setiap tahunnya melalui program pemerintah DKI Jakarta yaitu Jakpreneur (Amirah, 2022). Disisi lain, kenaikan jumlah UMKM di kota Jakarta Timur yang cukup besar belum diimbangi oleh perkembangan kualitas UMKM yang ada. Menurut data yang didapatkan dari Sudin PPKUM Jakarta Timur, di tahun 2023 UMKM yang beroperasi di Kota Jakarta Timur jumlahnya berkurang menjadi 5.534 usaha yang pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 yang berjumlah 8.461 unit. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian UMKM belum dapat meningkatkan daya saing dan mempertahankan usahanya. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Sudin PPKUKM Jakarta Timur, jumlah omset UMKM Jakarta Timur pada tahun 2023 juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, jumlah omset yang diperoleh oleh UMKM sebesar Rp 1.494.641.144.417. Sedangkan, jumlah omset UMKM pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.467.846.850.049. Hal ini menunjukkan upaya untuk mengembangkan UMKM di kota Jakarta Timur belum efektif dan optimal serta belum dapat meningkatkan kinerja usahanya.

UMKM telah berkontribusi besar meningkatkan kondisi ekonomi negara Indonesia, namun masih terdapat tantangan pada bidang ini (Khabibah & Purnamasari, 2020). Meskipun jumlahnya terus meningkat tiap tahun tetapi

faktanya kenaikan jumlah UMKM ini tidak disejalan dengan pengembangan kualitas dari UMKM tersebut. Saat ini usaha kecil menengah masih terbatas pada usaha berskala kecil, mereka mengalami kesulitan dalam berkembang memperbesar usahanya (Asisa et al., 2022). Hambatan yang saat ini ditemukan seperti hak cipta, keuangan, promosi dan banyak masalah yang lain terkait dengan cara mengelola bisnis yang sulit untuk diatasi sepenuhnya, sehingga menyulitkan usaha kecil untuk bersaing dengan perusahaan besar. Hal ini diakibatkan buruknya kinerja UMKM (Asisa et al., 2022). Kinerja UMKM adalah pencapaian yang diraih oleh pelaku usaha terhadap tujuan yang telah ia tetapkan meliputi peningkatan penjualan, modal, pelanggan, dan laba pada usahanya (Damayanti & Mardiana, 2023). Meskipun sektor UMKM memiliki peran yang sentral dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, namun tidak mudah untuk meningkatkan kinerja UMKM karena mereka tidak mengetahui cara mengevaluasi kinerjanya dengan baik. Pengusaha sulit mengevaluasi keberhasilan bisnis (Ilarrahmah & Susanti, 2021). Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah pengembangan berkelanjutan yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja UMKM.

Sumber daya manusia menjadi suatu bagian yang penting dalam pengelolaan bisnis suatu usaha. SDM merupakan suatu modal dimiliki oleh setiap usaha dibidang apapun. SDM menjadi konseptor sekaligus eksekutor pada suatu usaha. Dengan kata lain, UMKM yang tidak mempunyai SDM yang mumpuni, usaha tersebut tidak terkelola dengan baik. Kompetensi kewirausahaan yang baik akan menentukan hasil yang akan didapat oleh perusahaan sekaligus menentukan tingkat daya saing dari bisnis itu pula. Dalam studi yang dilakukan Siregar et al. (2022), menyebutkan bahwa kompetensi adalah keahlian yang manusia gunakan dalam menyelesaikan tugas kerja. Kompetensi diartikan sebagai keahlian SDM untuk melaksanakan berbagai penugasan dan urusan kerja yang ia miliki dengan tahap-tahapan yang akurat. Apabila seseorang tidak memiliki kompetensi yang baik, maka akan berdampak serius pada kualitas kinerja perusahaan dan dapat menghambat perusahaan untuk mencapai tujuannya. Karenanya kedua saling berkaitan, baik pemerintah

maupun perusahaan harus dapat membantu pengembangan kompetensi dengan mengasah potensi dan meningkatkan kompetensi kewirausahaan yang dimiliki pelaku usaha agar aktivitas operasional perusahaan menjadi optimal dan visi yang telah dibuat perusahaan dapat terpenuhi. Biasanya kompetensi kewirausahaan dapat dilihat dari tingkat studi yang ia tempuh. Tingkat pendidikan yang makin tinggi, semakin tinggi pula kompetensi yang ia miliki. Pelaku usaha yang berlatarkan pendidikan yang tinggi, biasanya dapat mengerjakan sesuatu dengan baik berkat tingkat pengetahuan, wawasan dan keilmuan yang ia telah dapatkan.

Selain kompetensi kewirausahaan, kinerja keuangan menjadi suatu hal yang sama pentingnya. Banyak faktor yang menentukan kinerja keuangan UMKM, salah satunya adalah akses permodalan. Karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat, akses keuangan dan pemahaman di sektor keuangan harus didorong (Yanti, 2019). Terdapat banyak pelaku UMKM yang belum memiliki keahlian dalam melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran hingga menjadi laporan keuangan (Widiiputra et al., 2021). Sementara itu, laporan keuangan adalah faktor penting bagi perbankan untuk dapat memberikan dana kredit bagi UMKM. Salah satu alasan UMKM tidak dapat berkembang adalah kualitas laporan keuangan mereka yang kurang baik dan menyebabkan mereka sulit untuk dapat mendapatkan modal dengan cara mengajukan kredit usaha (Setyaningsih & Farina, 2021). Keterbatasan modal merupakan kendala yang sering ditemui oleh para pelaku usaha. Menurut Sudarma et al. (2022), inti permasalahan yang menjadi tantangan UMKM yaitu mengenai keuangan, manajemen, produksi, dan keberlanjutan. Mungkin terdapat banyak ide bisnis yang ada dalam benak pelaku UMKM, tetapi tidak adanya tambahan modal yang tersedia menjadi penghalang bagi pengembangan usahanya. Disinilah diperlukan peran penting dari sistem informasi akuntansi (SIA) pada UMKM, karena penerapan SIA dengan akurat dapat memberikan penjelasan mengenai usaha dan posisi keuangan dengan lebih terstruktur dan lengkap (Prastika & Purnomo, 2019). Laporan keuangan yang baik dari peminjam menjadi dasar bagi pemberi pinjaman untuk

memberikan pinjaman dengan mengurangi risiko ketidakpastian informasi.

Laporan keuangan akan memudahkan UMKM dalam pengambilan suatu keputusan dalam pengelolaan usahanya seperti untuk memperbesar jangkauan pasar atau untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan memahami informasi yang disajikan secara baik (Listyani et al., 2019). Penerapan SIA bertujuan untuk keperluan pengumpulan, menyimpan, pemeliharaan dan pengolahan data transaksi yang nantinya diolah menjadi informasi mengenai akuntansi dan keuangan. Dalam studinya, Wibowo et al. (2022), menjelaskan bahwasanya bagi UMKM penting sekali untuk dapat menerapkan SIA yang baik, karena pencatatan keuangan menggunakan sistem pelaporan manual dapat memberikan efek negatif terhadap keuntungan bisnis mereka. Sejalan dengan pendapat tersebut, Amalia (2023), menyampaikan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dapat memberikan dampak yang signifikan apabila jika digunakan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, UMKM yang ingin usahanya lebih maju perlu menerapkan sistem informasi akuntansi agar meningkatkan kualitas pencatatan keuangannya.

Amalia (2023), menyebut kualitas pelaporan keuangan juga memberikan pengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Menurut Thottoli (2020), permasalahan mengenai akuntansi yaitu pada saat menyusun laporan keuangan dapat menghambat kinerja UMKM, pelaku usaha kesulitan dalam menilai kinerja pada keuangan usaha saat ini dan juga masa depan. Pelaku usaha sebaiknya menyusun laporan keuangan dikarenakan memuat keterangan yang berguna untuk memberikan peningkatan kinerja usaha (Ermawati & Arumsari, 2021). Kondisi saat ini, UMKM masih memiliki standar rendah dan kelemahan saat menghadapi tantangan tersebut. Salah satu alasannya karena banyaknya pelaku usaha yang belum mendapatkan manfaat dari kebijakan investasi pemerintah. Akibatnya, pelaku UMKM seringkali membuat laporan keuangan yang tidak akurat.

Mereka berpikir terpenuhinya kebutuhan sehari-hari merupakan sebuah kesuksesan bisnis. Pelaku UMKM merasa tidak perlu harus melakukan pembukuan transaksi keuangan usaha yang mereka lakukan. Kebanyakan usaha

kecil memanfaatkan modal yang mereka miliki sendiri atau pemiliknya dikarenakan berputarnya keuntungan usaha yang didapat, maka perkembangan skala usaha dibatasi oleh besaran modal. Mayoritas UMKM tidak melakukan akuntansi rinci karena terbatasnya pengetahuan akuntansi dari pelaku usaha. Pada penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih & Farina (2021), menemukan fakta bahwa laporan keuangan UMKM Indonesia masih berkualitas rendah. Kualitas laporan keuangan UMKM yang rendah membuat pelaku UMKM kesulitan memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Dalam upaya membantu UMKM agar memenuhi persyaratan pelaporan keuangan, Komite Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia membuat kemudian menyetujui Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2016, yang diberlakukan dari tanggal 1 bulan Januari tahun 2018. SAK EMKM (Mikro, Kecil dan Standar Akuntansi Perusahaan Menengah) diciptakan sebagai acuan standar akuntansi keuangan yang diperuntukan untuk kebutuhan UMKM. Ini menjadi sesuatu yang baik bagi pelaku UMKM, karena pelaporan keuangan adalah bagian yang penting dalam suatu bisnis. Tentunya segala transaksi pengeluaran dan pemasukan harus jelas dan seimbang agar bisnis dapat berkembang. Diberlakukannya kebijakan ini ditujukan agar menjadi salah satu katalis untuk meningkatkan literasi keuangan para pelaku UMKM di Indonesia dengan memberikan peluang yang lebih luas terhadap pinjaman pada sektor keuangan.

Literasi keuangan merupakan faktor yang memberikan dampak pada keberhasilan kinerja UMKM (Hamidah et al., 2020). Jumlah UMKM di Indonesia kenyataannya melebihi negara lain, tetapi realitanya tingkat literasi Indonesia masih tergolong rendah (Ilarrahmah & Susanti, 2021). Berdasarkan data hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2022 memperlihatkan indeks literasi keuangan masyarakat di negara Indonesia berada di angka 49,68%, hasil survei tersebut mengalami kenaikan melebihi tahun 2019 yang memiliki angka 38,03%. Disisi lain, indeks untuk inklusi keuangannya mencapai angka 85,10%, mengalami peningkatan daripada SNLIK sebelumnya yaitu di tahun 2019 yang

angkanya sebesar 76,19% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Data ini menandakan bahwa terdapat kesenjangan antara tingkat literasi dan tingkat inklusi keuangan pada 2022 yang cukup besar yakni sebesar 35,42% (Republika, 2024). Angka kesenjangan yang cukup besar ini memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum mengetahui karakteristik produk-produk dan jasa layanan pada sektor keuangan yang disediakan dari institusi keuangan resmi. Dari faktanya, literasi keuangan menjadi suatu kemampuan yang dibutuhkan dalam konteks peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, hak perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan. Kesenjangan yang tinggi juga mengindikasikan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan jasa pada sektor keuangan tanpa memiliki pengetahuan yang memadai untuk menunjang pengetahuan tentang jasa keuangan yang mereka gunakan. Pada akhirnya, berbagai kejahatan kerap terjadi di sektor keuangan akibat rendahnya literasi keuangan para korbannya.

Di era revolusi industri 4.0, literasi keuangan digital menjadi suatu kebutuhan bagi banyak orang, khususnya para pelaku usaha. Dengan zaman yang makin berkembang saat ini, banyak tersedia layanan jasa keuangan yang memberikan banyak keuntungan dan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Tidak hanya dampak positif, era digitalisasi ini juga membawa banyak risiko yang dapat menghambat UMKM untuk maju. Kasus yang sering ditemui adalah UMKM yang menggunakan pinjaman online ilegal dan berakibat data pribadi yang terakses oleh umum. Perlu ada usaha peningkatan pengetahuan terbaru yang diberikan kepada para UMKM agar nantinya berbagai kalangan dapat memanfaatkan inovasi pada layanan keuangan digital (Damarsiwi et al., 2023).

Era digitalisasi memiliki potensi praktik kejahatan yang cukup besar dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai layanan keuangan digital yang dimiliki para pelaku UMKM. Indonesia memiliki angka literasi keuangan digital yang baru menyentuh angka 35,5%, namun jumlah masyarakat yang sudah memanfaatkan layanan digital baru sebesar 31,26%. Angka ini

menunjukkan masih banyak pengguna layanan sektor keuangan di negara Indonesia yang belum mengetahui atau belum mahir dalam menggunakan produk keuangan dengan baik (OJK Institute, 2021). Hal ini masih menjadi masalah besar bahkan di era ekonomi digital, karena rendahnya tingkat literasi keuangan digital publik, khususnya bagi UMKM dikarenakan ini merupakan masalah besar (Rahmiyanti & Arianto, 2023). Oleh karena, ini perlu menjadi perhatian bagi yang pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan digital yang ada di Indonesia agar pelaku usaha dapat mengoptimalkan layanan jasa keuangan digital dengan baik. Terdapat penelitian terdahulu yang menemukan literasi keuangan digital memberi pengaruh terhadap kinerja UMKM yaitu (Ratnawati & Soelton, 2022), (Ratnawati et al., 2023.), (Kusumawardhani et al., 2023). Terdapat perbedaan pada hasil penelitian (Mangawing et al., 2023) yang menunjukkan hasil negatif. Selain itu, terdapat penelitian terdahulu yang menunjukkan SIA berpengaruh terhadap kinerja UMKM yaitu (Farina & Opti, 2023), (Meylani & Ismunawan, 2022), (Saputri & Shiyammurti, 2022). Terdapat perbedaan dari penelitian (Wahyuni et al., 2021), (Firdhaus & Akbar, 2022) yang menunjukkan SIA tidak mempengaruhi kinerja UMKM.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan, dan Literasi Keuangan Digital Terhadap Kinerja UMKM”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada beberapa masalah yang disampaikan sebelumnya dan penelitian yang terdahulu, peneliti merumuskan rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja UMKM?
2. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja UMKM?
3. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM?
4. Apakah literasi keuangan digital berpengaruh terhadap kinerja UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, ditetapkan tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja UMKM.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh literasi keuangan digital terhadap kinerja UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberi manfaat dan menjadi referensi atau acuan bagi penelitian kedepannya, khususnya terkait kompetensi kewirausahaan, sistem informasi akuntansi, kualitas laporan keuangan, literasi keuangan digital terhadap kinerja UMKM.
- b. Membuktikan *gap* yang ada pada penelitian sebelumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. *Bagi Stakeholder*

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat bagi UMKM atau Suku Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Sudin PPKUKM) Jakarta Timur dan komunitas UMKM seperti OK OCE Indonesia sebagai dasar diskusi dalam mengadakan edukasi kompetensi kewirausahaan, penggunaan sistem informasi akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan pemberian modal.

b. **Bagi Pihak Ekseternal Lainnya**

Diharapkan penelitian ini akan memberi pengetahuan kepada para investor, kreditor, dan lembaga keuangan untuk membantu meningkatkan kinerja UMKM melalui pemberian modal.

c. **Bagi Akademisi**

Diharapkan penelitian ini akan menjadi alat pembelajaran dalam memperkaya pengetahuan dan keilmuan pembaca.

d. **Bagi Pelaku UMKM**

Diharapkan penelitian ini akan memperluas pengetahuan dan sudut pandang tentang pentingnya kompetensi kewirausahaan, sistem informasi akuntansi, kualitas laporan keuangan dan literasi keuangan digital yang dapat meningkatkan kinerja UMKM.